

ANALISIS KEBUTUHAN NARAPIDANA PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, GILBERTH CHRISTOFFEL

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
christoffelgilberth@gmail.com

Abstract: *This study explores the needs of female inmates, a vulnerable group within correctional facilities, highlighting the urgency of addressing their specific requirements. Female inmates often face unique challenges, including mental health issues, lack of access to healthcare, and insufficient rehabilitation programs. Utilizing a qualitative research approach, data were collected through interviews and focus group discussions with female inmates and correctional staff. The findings reveal significant gaps in the provision of healthcare services, educational opportunities, and psychological support for female inmates. The study concludes that targeted policies and programs are essential to meet the needs of female inmates, ensuring their rights and facilitating successful reintegration into society.*

Keywords: *female inmates; vulnerable groups; correctional facilities; healthcare access.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi kebutuhan narapidana perempuan, sebagai kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan, dengan menyoroti urgensi penanganan kebutuhan spesifik mereka. Narapidana perempuan sering menghadapi tantangan unik, termasuk masalah kesehatan mental, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan program rehabilitasi yang tidak memadai. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok fokus dengan narapidana perempuan dan staf pemasyarakatan. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan dukungan psikologis bagi narapidana perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan program yang terfokus sangat penting untuk memenuhi kebutuhan narapidana perempuan, memastikan hak-hak mereka, dan memfasilitasi reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: narapidana perempuan; kelompok rentan; lembaga pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Kehadiran narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan (lapas) menimbulkan berbagai tantangan yang unik dan kompleks. Sebagai kelompok rentan, mereka sering kali mengalami diskriminasi dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik mereka. Lapas yang didesain untuk menampung narapidana umumnya tidak mempertimbangkan perbedaan gender, sehingga menyebabkan narapidana perempuan menghadapi kesulitan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada narapidana perempuan sering kali memperburuk kondisi mereka, baik di dalam lapas maupun setelah mereka dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebutuhan narapidana perempuan agar kebijakan dan program yang ada dapat lebih responsif terhadap situasi mereka.

Dalam penelitian ini, teori kebutuhan dasar Maslow digunakan sebagai kerangka untuk memahami kebutuhan narapidana perempuan. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks narapidana perempuan, kebutuhan dasar seperti kesehatan, keamanan, dan dukungan emosional menjadi sangat penting. Selain itu, teori gender juga diterapkan untuk menganalisis bagaimana perbedaan gender

mempengaruhi pengalaman narapidana perempuan di lapas. Teori ini menekankan pentingnya memahami peran sosial dan budaya dalam membentuk kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa narapidana perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Sebuah studi oleh Smith (2020) menemukan bahwa banyak narapidana perempuan yang mengalami masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, penelitian oleh Jones (2021) menunjukkan bahwa program pendidikan di lapas sering kali tidak memperhatikan kebutuhan spesifik narapidana perempuan, sehingga menghambat proses rehabilitasi mereka. Meskipun ada beberapa penelitian yang menyoroti isu-isu ini, masih terdapat kekurangan dalam analisis yang mendalam mengenai kebutuhan narapidana perempuan sebagai kelompok rentan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai narapidana secara umum, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebutuhan narapidana perempuan di lapas, serta mengidentifikasi kebijakan dan program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif bagi narapidana perempuan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Spesifikasi penelitian dilakukan di beberapa lapas yang menampung narapidana perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus dengan narapidana perempuan dan staf lapas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses narapidana perempuan terhadap layanan kesehatan yang layak dan memadai di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana perempuan yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka sering kali tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, baik untuk masalah kesehatan fisik maupun mental. Beberapa diantaranya mengungkapkan bahwa mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan konsultasi dengan dokter, dan terkadang hanya diberikan obat-obatan tanpa pemeriksaan yang komprehensif. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama bagi kelompok rentan seperti narapidana perempuan. Teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis, termasuk di dalamnya kesehatan, menjadi prioritas utama bagi setiap individu. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan sulit bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih tinggi, seperti keamanan, rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam konteks narapidana perempuan, kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak tidak hanya berdampak pada kondisi fisik mereka, tetapi juga dapat memicu masalah-masalah psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun

juga dialami oleh narapidana perempuan di berbagai belahan dunia. Sebuah studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa narapidana perempuan cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana laki-laki, terutama terkait dengan masalah kesehatan mental, penyakit menular, dan kehamilan. Namun sayangnya, layanan kesehatan di dalam lapas seringkali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari populasi ini. Akibatnya, banyak narapidana perempuan yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan harus menghadapi konsekuensi jangka panjang dari masalah kesehatan yang tidak teratasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil. Penyediaan anggaran yang memadai untuk layanan kesehatan di dalam lapas, peningkatan kompetensi tenaga medis, dan pengembangan program-program kesehatan yang responsif gender merupakan beberapa langkah yang dapat diambil. Selain itu, keterlibatan aktif dari narapidana perempuan sendiri dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan juga sangat penting, agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa hak narapidana perempuan untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih sehat, baik secara fisik maupun mental.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Selain masalah kesehatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam konteks rehabilitasi narapidana perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak narapidana perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam banyak kasus, program pendidikan yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan cenderung bersifat umum dan tidak memperhitungkan perbedaan gender serta kondisi spesifik yang dihadapi oleh narapidana perempuan. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka merasa terasing dan tidak terlayani, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Program pendidikan yang ada sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan psikologis narapidana perempuan. Misalnya, banyak narapidana perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga, seperti mengurus anak, sehingga mereka membutuhkan fleksibilitas dalam jadwal pendidikan. Namun, kurikulum yang ditawarkan sering kali kaku dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja juga menjadi masalah. Banyak narapidana perempuan yang merasa bahwa pendidikan yang mereka terima tidak memberikan mereka keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja setelah dibebaskan, sehingga mereka kembali terjebak dalam siklus kemiskinan dan kejahatan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dalam akses pendidikan di lapas dapat memperburuk stigma sosial yang sudah ada. Narapidana perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan stereotip negatif yang menganggap mereka tidak layak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hal ini menciptakan siklus di mana mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan motivasi untuk belajar. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan narapidana perempuan, di mana mereka dapat merasa aman untuk belajar dan berkembang. Program pendidikan harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan, sehingga mereka dapat merasakan

manfaat nyata dari pendidikan yang mereka terima. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang lebih efektif. Pengembangan kurikulum yang responsif gender, pelatihan bagi pengajar untuk memahami kebutuhan narapidana perempuan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Selain itu, melibatkan narapidana perempuan dalam perencanaan program pendidikan dapat memberikan perspektif yang berharga dan memastikan bahwa program yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi narapidana perempuan tidak hanya akan mendukung proses rehabilitasi mereka, tetapi juga membantu mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

3. Dukungan Psikologis dan Emosional

Selain akses terhadap layanan kesehatan fisik dan pendidikan, dukungan psikologis dan emosional juga menjadi kebutuhan yang mendesak bagi narapidana perempuan. Hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak narapidana perempuan mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jauh dari keluarga, kehilangan kebebasan, serta stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai untuk mengatasi permasalahan ini. Akibatnya, masalah-masalah kesehatan mental dapat semakin memburuk dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental narapidana perempuan di dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat dari minimnya program dukungan psikologis yang tersedia. Dalam banyak kasus, lembaga pemasyarakatan hanya menyediakan layanan konseling dasar yang dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan mental. Selain itu, jumlah tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater yang bertugas di lapas juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak narapidana perempuan yang membutuhkan perawatan intensif untuk masalah kesehatan mental tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Akibatnya, mereka harus berjuang sendiri untuk mengatasi permasalahan psikologis yang mereka hadapi, tanpa dukungan yang dibutuhkan. Pentingnya dukungan psikologis bagi narapidana perempuan juga dapat dilihat dari dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan jika masalah ini tidak diatasi. Narapidana perempuan yang mengalami masalah kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, atau bahkan bunuh diri. Selain itu, masalah kesehatan mental yang tidak teratasi juga dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas dari hukuman. Narapidana perempuan yang tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengatasi tantangan hidup sehari-hari dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dukungan psikologis bagi narapidana perempuan di dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan mental yang bertugas di lapas, pengembangan program-program dukungan psikologis yang responsif gender, serta pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk dapat mengenali dan menangani masalah-masalah kesehatan mental. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga layanan kesehatan mental juga dapat memperluas jangkauan dan kualitas layanan yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan narapidana perempuan dapat memperoleh dukungan

psikologis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi mental yang sehat.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebutuhan narapidana perempuan sebagai kelompok rentan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan yang ada saat ini, narapidana perempuan sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak narapidana perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, program pendidikan yang relevan, serta dukungan psikologis yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Kesenjangan ini menciptakan tantangan tambahan bagi mereka dalam menjalani masa hukuman dan berpotensi menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kondisi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan. Kebijakan yang ada saat ini sering kali tidak mempertimbangkan perbedaan gender dan kebutuhan spesifik narapidana perempuan, sehingga program-program yang ditawarkan tidak efektif dalam mendukung rehabilitasi mereka. Misalnya, program pendidikan yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan tanggung jawab keluarga atau kebutuhan psikologis narapidana perempuan dapat menyebabkan mereka merasa terasing dan tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan narapidana perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi program, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana perempuan tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk keseluruhan sistem pemasyarakatan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis, narapidana perempuan akan lebih mampu menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi tingkat recidivism dan meningkatkan peluang mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Oleh karena itu, investasi dalam program-program yang mendukung kebutuhan narapidana perempuan bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga pemasyarakatan segera merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Ini mencakup pengembangan program kesehatan yang komprehensif, pendidikan yang inklusif, dan dukungan psikologis yang terintegrasi. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk memahami dan menangani isu-isu gender juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan narapidana perempuan tidak hanya mendapatkan hak-hak mereka, tetapi juga dapat menjalani masa hukuman dengan lebih bermartabat dan kembali ke masyarakat dengan potensi yang lebih baik untuk sukses.

Daftar Pustaka

- Sujoko, I., Syarif, E., Humaira, A., & Adhha, N. (2020). *Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, H. (2012). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Wieringa, S. E., & Walker, L. (1999). *Gender dan gerakan perempuan*. Jakarta: Garba Budaya.
- Santoso, A. (2018). *Perempuan dan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, R. (2019). *Kebutuhan khusus narapidana perempuan: Perspektif hukum dan sosial*. Jakarta: Kencana.